

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Tahun 2016 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Capaian kinerja sebesar 91,33% , atau lebih tinggi 8,11% dibanding tahun sebelumnya merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik selama tahun 2016. Tentunya ada yang bisa tercapai dan ada beberapa yang terkendala. Komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang saling bersinergi dari masing-masing pegawai menjadi kunci utama di samping sarana dan prasarana.

Kami berharap masukan dan saran konstruktif untuk peningkatan kualitas kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Kota Magelang agar di masa yang akan datang bisa memberikan kontribusi positif meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud *good governance* dan *clean government*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MAGELANG**

Drs. ARIF BARATA SAKTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630213 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Bab I **PENDAHULUAN**

- A. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Landasan Hukum
 - 4. Sistematika Penulisan
- B. Gambaran Umum Kantor Penelitian , Pengembangan dan Statistik Kota Magelang
 - 1. Susunan Organisasi
 - 2. Aspek Strategis
- C. Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang

Bab II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis sesuai RPJMD Tahun 2016-2021
- B. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Bab III **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Indikator Kinerja
- C. Capaian Kinerja Organisasi
- D. Realisasi Anggaran

Bab IV **PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016

1. Latar belakang

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel, disusun laporan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, oleh setiap instansi pemerintah yang memuat perjanjian kinerja, pelaporan kinerja terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- a. Maksud dari penyusunan laporan adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- 25) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
- 26) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan satuan Polisi Pamong Praja;
- 27) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016;
- 29) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 30) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2017;
- 31) Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2017;
- 32) Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang;

4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang tahun 2016, sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

D. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang

- Tahun 2016
5. Latar Belakang
 6. Maksud dan Tujuan
 7. Landasan Hukum
 8. Sistematika Penulisan
- E. Gambaran Umum Kantor Penelitian , Pengembangan dan Statistik Kota Magelang
3. Susunan Organisasi
 4. Aspek Strategis
- F. Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis sesuai RPJMD Tahun 2016-2021
- B. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- E. Pengukuran Kinerja
- F. Indikator Kinerja
- G. Capaian Kinerja Organisasi
- H. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

B. Gambaran Umum Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016

Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

urusan wajib terdiri 26 (dua puluh enam) urusan, dimana Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik menangani urusan ke 24 (dua puluh empat) yaitu urusan statistik.

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sesuai Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi-seksi, meliputi :
 - 1). Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial
 - 2). Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana
 - 3). Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
- d. Kelompok jabatan Fungsional.

1.1. Kedudukan

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sub Bagian Tata Usaha kantor dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, sedangkan Seksi pada kantor, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang semuanya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

kepala kantor. Kelompok jabatan fungsional yang ada dikantor disesuaikan dengan kebutuhan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik adalah Peneliti.

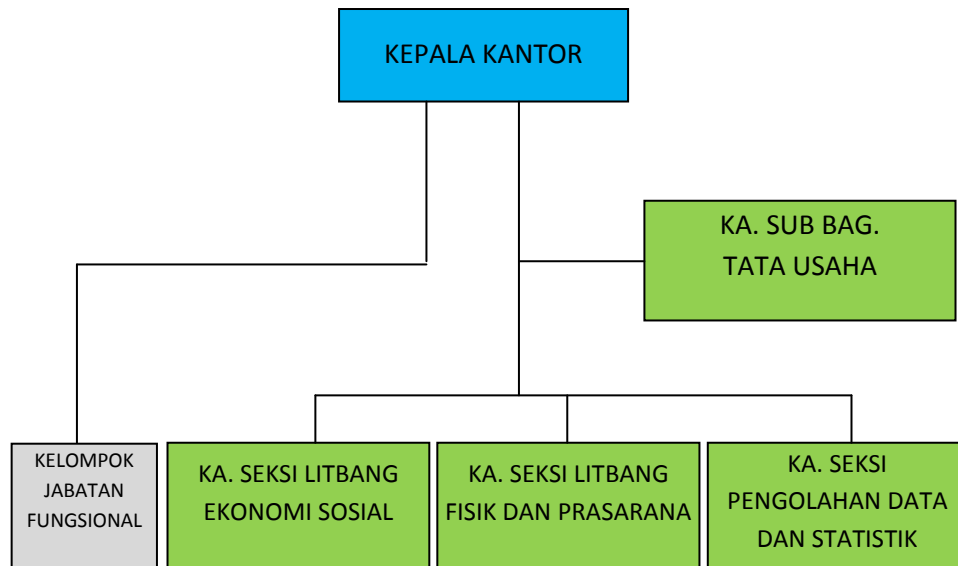
Kepala kantor adalah jabatan struktural eselon IIIa dan kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa

1.2. Bagan Organisasi

Bagan organisasi yang dimuat dalam Lampiran IX Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Bagan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik



1.3. Tugas Pokok dan uraian tugas

Tugas pokok , fungsi dan rincian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor penelitian, pengembangan dan statistik didasarkan pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 sebagai berikut :

1.3.1 Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang penelitian, pengembangan dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik berpedoman pada uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan visi misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik.
- c. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kantor.
- d. Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan program kegiatan pada sub bag tata usaha serta seksi-seksi di bawahnya.
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penelitian, pengembangan dan statistik.
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik daerah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

- g. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, serta fisik dan prasarana.
- h. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana dan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota.
- i. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam hal melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha berpedoman pada uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (renstra) kantor.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan kantor.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kantor.
- d. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- e. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kantor.
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan kantor.
- g. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi serta pengelolaan barang-barang inventaris kantor.
- h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penggajian pegawai, mutasi dan lain-lain di lingkungan kantor.
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan kantor.
- j. Menyiapkan bahan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkup kantor.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kantor.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial.
- d. Merumuskan perencanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda,

olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.

- f. Melakukan inventarisasi permasalahan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.
- g. Membantu atasan dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.4. Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan Fisik Dan Prasarana

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam sub bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana berpedoman pada uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana.
- d. Merumuskan perencanaan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- f. Melakukan inventarisasi permasalahan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- g. Membantu atasan dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.5. Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Statistik

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam sub bidang pengolahan data dan statistik.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik berpedoman pada uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengolahan data dan statistik.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang pengolahan data dan statistik.
- d. Melaksanakan kegiatan pengolahan data statistik, sebagai bahan evaluasi dan acuan di dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan data dan statistik serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- f. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan data dan statistik.
- g. Memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota.
- h. Mengembangkan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
- i. Memberikan petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

1.3.6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Tahun 2016 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang memiliki 1 (satu) orang Peneliti yaitu peneliti ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9 /2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Pasal 4, rincian Tugas Peneliti Pertama

- a. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan litbang iptek sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
- b. Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
- d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

1.4 Fungsi

1.4.1. Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta administrasiumum dan kepegawaian kantor.
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian seksi-seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kantor.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kantor.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kantor.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

1.4.3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

1.4.4. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.
- c. Pelaksanaan kegiatan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.

1.4.5. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik.

Sumber daya manusia yang ada di Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang PNS dan 2 (dua) orang CPNS. Selain pegawai PNS dan CPNS, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dibantu oleh 4 (empat) tenaga tidak tetap yang direkrut dan dikontrak setiap tahun.

Kondisi Pegawai ditinjau dari jenis kelaminnya, jabatan, golongan/pangkat , tingkat pendidikan dan kelompok umur sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Sampai dengan akhir tahun 2016, Pegawai (PNS dan CPNS) menurut jenis kelamin hampir seimbang, pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 46.67% dari total pegawai perempuan yaitu sebesar 53.33% sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	7	46.67
2	Perempuan	8	53.33
		15	100,00

Sumber Data TU Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang, data diolah

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang antara Pejabat baik Eselon III , IV dan Fungsional sebesar 46.67% hampir sebanding dengan jumlah pelaksana/staf yang sebesar 53.33% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Menurut Jabatan (Struktural/Fungsional)

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
----	---------	--------	------------

1	Kepala Kantor (Eselon III)	1	6.67
2	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	4	26.66
3	Jabatan Fungsional	1	6.67
4	Pelaksana/staf	9	60.00
		15	100,00

Sumber Data TU Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang, data diolah

❖ Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 66.67% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Menurut Golongan/Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	4	26.67
3	Golongan III	10	66.67
4	Golongan IV	1	6.67
		15	100,00

Sumber Data TU Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang, data diolah

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana

(D3/S1/S2) atausebesar 79,99% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.4:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	3	20.00	2	13.33	5	33.33
2	Sarjana/ S1	2	13.33	3	13.33	5	33.33
3	Sarjana Muda/ D3	0	0	2	13.33	2	13.33
4	Sekolah Menengah Atas	1	6.67	1	6.67	2	13.33
5	Sekolah Menengah Pertama	1	6.67	-	0	1	6.67
6	Sekolah Dasar	0	0	-	0	0	0
		7	46.67	8	53.33	15	100

Sumber Data TU Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang, data diolah

❖ Menurut Kelompok Umur :

Pegawai Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang menurut kelompok umur masih dalam usia produktif, tidak ada yang akan memasuki usia pensiun. Sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 79,99% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.5:

Tabel 1.5

Jumlah PNS Dan CPNS Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Menurut Kelompok Umur, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PADA SETIAP JENJANG PENDIDIKAN																JUMLAH MENURUT JENIS KELAMIN	JUMLAH KESELURUHAN	
	SMP SEDERAJAT		SMA SEDERAJAT		D1		D2		D3		D4		S1		S2				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
<25 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-35 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	3
36-45 Tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	4	2	6
46-55 Tahun	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	6
JUMLAH	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	3	2	7	8	15
Prosentase	6.67		13.33		0		0		13.33		0		33.33		33.33		46.7	53.3	

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang, Tahun 2016

2. Aspek Strategis

Prioritas RPJMD Kota Magelang 2016-2021, sedang tema pembangunan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2016-2021 dan merupakan visi pembangunan daerah Kota

Magelang adalah “Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”. Visi Pembangunan Kota Magelang diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional.

Dalam upaya mewujudkan visi Kota Magelang pada akhir tahun perencanaan RPJMD 2016-2021 agar dapat memberikan arah maka ditetapkan pentahapan melalui 6 tahapan. Keenam tahapan tersebut meliputi : Tema Tahun I : Konektif dan Kolaboratif bersama Mitra ; Tema Tahun II : Kreatif dan Inovatif bersama Mitra ; Tema Tahun III : Produktif bersama Mitra ; Tema Tahun IV : Promotif dan Ekspansif bersama Mitra ; Tema Tahun V : Kompetitif bersama Mitra ; dan Tema Tahun VI adalah akomodatif dan Transitif menuju lanjutan. Pada akhir tahun perencanaan, monumen tercapainya Visi dan Misi ditandai dengan Kota Magelang diharapkan akan mendai kota yang “Ngrejeken (nyaman untuk mencari nafkah hidup), Ngayomi (masyarakat terlindungi), Ngayemi (masyarakat merasa nyaman tentram), Handarbeni (masyarakat merasa memiliki dan mencintai Kota Magelang), Marisi (masyarakat terbiasa hidup cinta lingkungan sehingga mewariskan bumi yang sehat selamat untuk anak cucunya) dan Ngangeni (masyarakat yang diperantauan dan masyarakat luar daerah rindu untuk datang ke Kota Magelang”.

Dalam mengimplementasikan tema pembangunan tersebut, dalam dokumen RPJMD mengakomodasikan adanya inovasi kebijakan sebagai media untuk mengakselerasikan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi sekaligus merespons isu-isu nasional, internasional dan global yang mengarusutama. Inovasi-inovasi kebijakan itu bisa disebutkan antara lain : (1) implementasi *smart city* (kota cerdas di Kota Magelang) ; (2) percepatan perwujudan kota inklusif di Kota Magelang yang dikemas dalam *universal design* ; (3) implementasi pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan *zero waste growth* di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan bank sampah dan kampung organik ; (4) penguatan branding Kota Magelang sebagai Kota

Sejuta Bunga ; (5) perluasan pemasaran Kota Magelang melalui penyelenggaraan eventy-event seni budaya, industry kreatif, olah raga, kuliner, *shopping tourism*, MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* atau pertemuan, insentif, Konvensi dan Pameran) ; (6) penguatan kerjasama daerah, khususnya dengan kalangan pengusaha dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) ; (7) Implementasi dan pemasyarakatan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) ; (8) Implementasi SDGs (*Sustainable Development Goals*) ; (9) Perubahan terhadap rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) guna mengantisipasi laju pertumbuhan investasi di Kota Magelang ; dan (10) kebijakan lainnya yang mengarahkan pada upaya peningkatan derajat pembangunan manusia (pelayanan kebutuhan dasar) sehingga Kota Magelang menjadi pusat rujukan bagi daerah sekitarnya,

Selain berpedoman pada tema pembangunan tahun 2016, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kinerjanya berpedoman pada kriteria yaitu :

- a). Korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional
- b). Korelasi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
- c). Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah
- d). Korelasi terhadap isu strategis daerah.

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu tugas kepala daerah, dalam mengemban tugas urusan penelitian, pengembangan dan statistik, memiliki 3 (tiga) unsur pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu :

1. Pelayanan dalam bidang penelitian

Yang dimaksud pelayanan dalam bidang penelitian adalah bahwa Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan penelitian hanya sebatas memfasilitasi penelitian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Demikian pula dengan riset, dimana riset yang dilaksanakan bekerja sama dengan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.

Pelayanan dalam bidang Penelitian yang dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, antara lain :

- Memberikan kajian terhadap berbagai permasalahan dan isu-isu strategis baik yang berskala Lokal / Regional / Nasional yang berdampak terhadap Kota Magelang yang didokumentasikan dalam bentuk buku dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
- Melakukan analisis / penelitian-penelitian aplikatif potensi daerah dalam berbagai bidang baik sosial, budaya, ekonomi, fisik dan prasarana yang didokumentasikan dalam bentuk buku dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan lintas SKPD baik sebagai perencanaan maupun pedoman dalam pengambilan kebijakan.
- Memfasilitasi terhadap riset-riset unggulan daerah agar mampu menghasilkan produk penelitian yang bernilai tambah dan berdaya saing.

2. Pelayanan dalam bidang pengembangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK mengandung maksud bahwa pemerintah daerah harus menjembatani, memfasilitasi dan mengembangkan dalam bidang pembangunan IPTEK di daerah.

Adapun pelayanan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam bidang pengembangan antara lain :

- Menggali potensi kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan penghargaan terhadap temuan-temuan masyarakat Kota Magelang di bidang IPTEK.
- Mensinergikan unsur-unsur yang menjadi potensi daerah dalam suatu wadah / jaringan penelitian guna menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan serta kemajuan IPTEK.

3. Pelayanan dalam Bidang Statistik

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, kewenangan bidang statistik meliputi :

a) Statistik Umum

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan statistik umum skala kota dilaksanakan melalui kerjasama antara Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dengan BPS Kota Magelang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah berkembangnya sistem Statistik Nasional.

b) Statistik Dasar

Dalam pelaksanaan statistik dasar oleh BPS Kota Magelang, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang memberikan dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kota yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang lebih luas, baik bagi Pemerintah maupun masyarakat, meliputi data lintas SKPD.

c) Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi/SKPD tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

d) Statistik Khusus

Dalam pelaksanaan statistik khusus yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat dan diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dikembangkan melalui jejaring statistik khusus skala kota.

C. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi di Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang merupakan bagian permasalahan pembangunan daerah yang harus disolusikan, dimana ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pada RPKMD dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan. Mengutip RKPD Tahun 2016, bahwa hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2015 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi.

Permasalahan yang dihadapi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik antara lain sebagai berikut :

(1) Urusan Perencanaan Pembangunan:

- Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.

- Terdapat kesulitan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.

(2) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :

- Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah.
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(3) Urusan Statistik :

- Kurangnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu
- Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan dan penyediaan data
- Belum tersedianya sistem informasi data yang baik.
- Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja
- Data dan referensi yang digunakan tidak konsisten
- Belum tingginya kesadaran aparat akan pentingnya data.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis sesuai RPJMD Tahun 2016-2021

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016-2021, penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021, yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan kelitbang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2016 - 2021. Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
- 5) Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

Dari 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tersebut di atas, Misi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelitbangan dan Statistik hanya 2 Misi yaitu Misi 1 dan Misi 3 adalah :

MISI 1 :

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari Misi 1 tersebut, diturunkanke dalam 4 (empat) Tujuan dan beberapa Sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN MISI 1 RPJMD KOTA MAGELANGTAHUN 2016-2021

Tujuan Ke	Sasaran
1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas	1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, disiplin, dan memenuhi standart kompetisi;

Tujuan Ke	Sasaran
	2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penegakan hukum tanpa diskriminasi
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata pemerintahan dan pelayanan publik menuju smart City 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan,	6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	8) meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi.

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik , mengampu urusan Statistik ada pada Misi 1 tujuan ke 2 yaitu **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi**, dan sasaran ke 5 (lima) , yang berbunyi **Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel**

MISI 3 :

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan Misi 3 tersebut, strategi dan kebijakan diarahkan untuk mencapai Tujuan dan beberapa Sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN DAN SASARAN MISI 3 RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

Tujuan Ke	Sasaran
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas.	1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat. 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi pendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan.	4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif. 6) Meningkatnya ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	7) Meningkatnya lapangan kerja 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, menurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	9) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan
5. Meningkatkan kesetaraan gender	10) Menurunnya kesenjangan gender

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

A.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada RPJMD Yang Terkait dengan Kelitbangan dan Statistik

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dan setelah mencermati Misi yang terkait, maka Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang perlu dirujuk dalam menyusun Rencana Strategis Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN TERKAIT KELITBANGAN DAN STATISTIK

STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>MISI 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi. <p>Sasaran 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel. 	
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standart Pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi</p>	<p>Publikasi data dan informasi pembangunan akurat dan terbaru</p>
<p>MISI 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat <p>Tujuan 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. 	

STRATEGI	KEBIJAKAN
Sasaran 3: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif. 	
Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa dan kontribusi sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah	Pemberian insentif bagi kreativitas dan inovasi

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

A.2. Program dan Kegiatan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 yang berkaitan dengan Kelitbangan dan urusan statistik, sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan bahan logistik kantor
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 14) Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- 15) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 16) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 17) Pengadaan Peralatan gedung kantor
- 18) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 19) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 20) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 21) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 22) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 23) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 24) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
- 25) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD

4. Program Pengembangan data/informasi

- 26) Analisis Situasi Pembangunan Manusia

- 27) Analisis Permasalahan dan isu-isu strategis Daerah
- 28) Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah
- 29) Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Penelitian
- 30) Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian
- 31) Kajian Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kota Magelang

5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

- 32) Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
- 33) Penyusunan buku Daerah Dalam Angka
- 34) Analisis Perkembangan Laju Inflasi
- 35) Manajemen Data Daerah

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 36) Pengelolaan Website

7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

- 37) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

- 38) Forum koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 39) Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- 40) Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang
- 41) Fasilitasi Dewan Riset Daerah
- 42) Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat
- 43) Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual

9. Program perencanaan Pembangunan Daerah

- 44) Penyusunan Rencana Strategis SKPD

45) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

46) Penyusunan Rencana Strategis SKPD

11. Program perencanaan sosial budaya

47) Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova

12. Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi

48) Pemeliharaan RTH

B. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dengan tetap mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah dan Tujuan serta sasaran pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, guna mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang lima tahun ke depan, maka indikator kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021

A. Urusan Wajib Statistik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDKATOR KINERJA SKPD	CAPAI AN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	THN TRANSISI 2022
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat												
	Tujuan ke 2 : Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif	Sasaran ke 3: Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Data Statistik	Persentase pemenuhan data statistik	85%	85%	87%	87%	90%	90%	92%	92%	95%

B. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDKATOR KINERJA SKPD	CAPAI AN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	THN TRANSISI 2022
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat												
	Tujuan 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Sasaran 2: Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	Cakupan inovasi yang ditindak lanjuti	1. Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas	5%	8%	11%	14%	17%	20%	23%	23%	25%
2. Persentase Krenova OPD yang berkualitas				0%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	12%	14%	
3. Persentase hasil riset/kajian yang ditindak lanjuti				25%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	55%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				4. Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	5%	7%	10%	12%	15%	17%	20%	20%	22%
				5. Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan	5%	7%	10%	12%	15%	17%	20%	20%	22%
				6. Cakupan publikasi hasil-hasil Penelitian	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	80%	85%
				7. Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	0%	0%	0%	5%	7%	10%	15%	15%	17%
				8. Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	0%	5%	7%	10%	12%	14%	15%	15%	17%
				9. Cakupan Penguatan SIDA	30%	35%	40%	45%	55%	65%	75%	75%	80%

				10. Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	30%	35%	40%	45%	55%	65%	75%	75%	80%
				11. Cakupan Implementasi kerjasama kelitbang dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta	20%	20%	25%	30%	50%	50%	66%	75%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, yang dilakukan baik berkala maupun tahunan.

Sebagai bahan untuk bisa membandingkan dan gambaran kinerja organisasi, diperlukan data organisasi yaitu : sumber daya manusia / aparatur dan sumber daya sarana/prasarana kerja.

Sumber daya manusi / aparatur adalah merupakan motor penggerak yang strategis berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Pada tahun 2016 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada tahun awal memiliki 13 (tiga belas) orang PNS, 2 (dua) orang CPNS formasi dan 4 (empat) orang tenaga tidak tetap.

Tabel 3.1
PNS/CPNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Awal Tahun 2016	Akhir Tahun 2016
1.	S-2	5 orang	5 orang
2.	S-1	5 orang	5 orang
3.	D 3	-	2 orang
4.	SLTA	2 orang	2 orang
5.	SLTP	1 orang	1 orang
	JUMLAH	13 orang	15 orang

Sumber : TU Kantor Litbang dan Statistik, data diolah

Tabel 3.2

TENAGA TIDAK TETAP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Awal Tahun 2016	Akhir Tahun 2016
1.	SLTA	3 orang	4 orang
2.	SLTP	0 orang	0 orang
	JUMLAH	3 orang	4 orang

Sumber : TU Kantor Litbang dan Statistik, data diolah

Sumber daya sarana/prasarana kerja yang digunakan selama tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.3

SARANA DAN PRASARANA KERJA

No.	Barang/Asset	Awal Tahun 2016	Akhir Tahun 2016
1.	Gedung kantor	4 ruangan	4 ruangan
2.	Kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	2 buah	2 buah
	Kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	4 buah	6 buah
3.	Telepon PABX	1 unit	1 unit
4.	Mesin faximili	1 unit	1 unit
5.	Brankas	1 buah	1 buah
6.	Mobile storage	2 buah	2 buah
7.	Mesin penghancur kertas	1 buah	2 buah
8.	Sound system	1 unit	1 unit
9.	podium	1 unit	1 unit
10.	Meja rapat	5 buah	5 buah
11.	Kursi rapat	17 buah	17 buah
	Kursi lipat	69 buah	69 buah
12.	LCD	2 buah	2 buah
13.	Scanner	1 buah	1 buah
14.	Kamera LSR	1 buah	1 buah
15.	LED TV	1 buah	1 buah

No.	Barang/Asset	Awal Tahun 2016	Akhir Tahun 2016
16.	Meja kerja	12 buah	12 buah
17.	Kursi kerja	18 buah	18 buah
18.	Komputer PC	10 buah	13 buah
19.	Laptop/notebook	4 buah	4 buah
20.	Printer	12 buah	12 buah
21.	UPS	12 buah	12 buah
22.	Meja komputer	7 buah	7 buah
23.	Mesin ketik	1 buah	1 buah
24.	papan tulis elektronik	1 buah	1 buah
25.	Almari perpustakaan	2 buah	2 buah
26.	Filling kabinet, almari kaca sliding	10 buah	10 buah
27.	Rak buku, rak arsip, rak besi	4 buah	4 buah
28.	Kipas angin	2 buah	2 buah
29.	Kompor gas	1 buah	1 buah
30.	Tabung gas	2 buah	2 buah
31.	Kitchen set atas dan bawah	2 unit	2 unit
32.	Almari makan, rak piring	3 buah	3 buah
33.	Magic com	1 buah	1 buah
34.	Dispenser	1 buah	1 buah
35.	Tabung pemadam kebakaran	2 buah	2 buah
36.	Rak koran	1 buah	1 buah
37.	Meja kursi tamu	2 set	2 set
38.	Komposter Komunal	3 unit	3 unit
39.	Vacum cleaner	-	1 buah
40.	Gapura tata rambat	-	1 buah

B. Indikator Kinerja

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, kemudian dituangkan dalam dirumuskan tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 sebagai arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah. Misi yang diemban Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang adalah:

1. Misi ke 1 yaitu "**Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat**" dengan tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja sebagai berikut :
 - Tujuan yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi".
 - Sasaran Strategis adalah Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel.

2. Misi ke 3 yaitu "**Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**" dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sebagai berikut :
 - Tujuan yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok kelompok pendapatan" , dengan indikator tujuan Pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

- Sasaran Strategis adalah Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran terkait Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Definisi Operasional
	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	M.1.3.5	Persentase Pemenuhan Data Statistik	Perbandingan antara jumlah jenis data yang dirilis terhadap jumlah dan jenis data yang dibutuhkan oleh pengguna data pada tahun n
	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	M.3.6.2	Cakupan Inovasi yang ditindak lanjuti	Jumlah Inovasi masyarakat yang dimanfaatkan dibagi jumlah inovasi masyarakat yang terpilih x 100%

Sumber Data : Perda Nomor 1 Tahun 2016

Dalam melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan serta statistik tersebut ditetapkan program prioritas sebanyak 10 (sepuluh) program dan ditetapkan indikator kinerja program. Indikator kinerja program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 juga digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang (terlampir).

Indikator kinerja utama (IKU) ini perlu dilengkapi dengan definisi operasional sebagai acuan dalam pengukuran kinerja.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas adalah :

$$x = \frac{\text{Jumlah hasil kreasi dan inovasi (Krenova) kategori A + B + C}}{\text{Peserta Krenova Masyarakat Th N}} \times 100\%$$

2. Persentase Krenova OPD yang berkualitas

$$x = \frac{\text{Jumlah Peserta Krenova OPD Th N}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

3. Persentase hasil riset/ kajian yang ditindak lanjuti

$$x = \frac{\text{Jumlah Penelitian pada thn N - 2 yang ditindaklanjuti pada Th N}}{\text{Jumlah Penelitian yang dilakukan pada Tahun N - 2}} \times 100\%$$

4. Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK

$$x = \frac{\text{Persentase (Kegiatan A + Kegiatan B + Kegiatan C)}}{\text{Jumlah Kegiatan Tahun N}}$$

$$\text{Persentase Kegiatan A} = \frac{\text{Peserta Apresiasi Budaya IPTEK}}{\text{Target Peserta Apresiasi Budaya IPTEK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kegiatan B} = \frac{\text{Kegiatan Diseminasi Tahun N}}{\text{Target pada RPJMD}} \times 100\%$$

Persentase Kegiatan C : sesuai target per tahun kegiatan Fasilitas Pusat Inovasi

5. Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan

$$x = \frac{\text{hasil penelitian yang diterima pada tahun } N - 1}{\text{Penelitian A + B + C di wilayah Kota Magelang pada Tahun } N - 1} \times 100\%$$

Penelitian A : Penelitian yang dilakukan OPD

Penelitian B : Penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi

Penelitian C : Penelitian yang dilakukan stakeholder

6. Cakupan Publikasi Hasil-hasil Penelitian :

$$x = \frac{\text{Jumlah data Penelitian terpublis pada tahun } N}{\text{Jumlah data Penelitian terdata pada Tahun } N} \times 100\%$$

7. Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Produk Teknologi dan Inovasi dibina pada tahun } N}{\text{Jumlah Produk Teknologi dan Inovasi terdata tahun } N} \times 100\%$$

8. Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI

$$x = \frac{\text{Produk yang didaftarkan mendapat HKI pada tahun } N}{\text{Target Produk berHKI pada RPJMD}} \times 100\%$$

9. Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan

$$x = \frac{A + B + C}{3} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{SDM yang mengikuti bintek/diklat Kelitbang pd tahun } N}{\text{Jumlah Pegawai Balitbang Tahun } N} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Mitra Kerja Aktif pada tahun } N}{\text{Jumlah seluruh Mitra Kerja Tahun } N} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{MoU Tahun N - 1 yang ditindaklanjuti pada tahun N}}{\text{Target MoU pada RPJMD}} \times 100\%$$

10. Cakupan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Ruang Lingkup Penguatan SIDa :

- ❖ Kebijakan 25 % (th 2017) ;
- ❖ Penataan Unsur 25% (Th 2017-2018)
- ❖ Pengembangan 50 % (Th 2018-2021)

11. Persentase Pemenuhan Data Statistik

$$x = \frac{\text{Jumlah Data dirilis pada tahun N}}{\text{Jumlah Data dibutuhkan}} \times 100\%$$

C. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016 adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, keberhasilan kinerja organisasi juga diukur melalui Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dengan Walikota Magelang sebagai tersaji dalam lampiran LKjIP ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Pada sub bab ini, analisa capaian kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016 akan difokuskan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diuraikan (pada sub bab B Indikator Kinerja) sebelumnya. Adapun capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Target 2016	Realisasi 2016	Kinerja RKPD Th. 2016
1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi masyarakat	Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas	23%	5%	8%	160%
		Persentase Krenova OPD yang berkualitas	12%	0%	2%	>100%
2	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil riset/kajian yang ditindak lanjuti	50%	25%	25%	100%
3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	20%	5%	7%	140%
4	Program Pemanfaatan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan	20%	5%	7%	140%
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	Cakupan publikasi hasil-hasil Penelitian	80%	30%	40%	133%
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	15%	0%	0%	Belum dapat diukur
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	0%	5%	>100%
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDA	75%	30%	35%	117%
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	30%	35%	117%

10	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Data Statistik	100%	85%	85%	100%
----	--	-------------------------------------	------	-----	-----	------

1. Persentase Krenova Masyarakat yang Berkualitas

Indikator kinerja ini diukur melalui kegiatan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Masyarakat yang merupakan kegiatan rutin di Kota Magelang dan sudah tidak asing bagi masyarakat Kota Magelang, Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan daya kreasi dan inovasi masyarakat. Kompetisi KRENOVA di Kota Magelang menjadi pelopor dan menginspirasi daerah-daerah lain untuk menyelenggarakan kompetisi serupa. KRENOVA Kota Magelang bahkan menjadi *Best Practice* dalam Forum APEKSI.

Prestasi yang diraih KRENOVA Kota Magelang terbilang sangat membanggakan. Beberapa KRENOVA Kota Magelang yang terpilih diajukan ke tingkat Propinsi Jawa Tengah bahkan sejak tahun 2005 - 2016 menghasilkan prestasi tidak terputus.

Tabel 3.5.
Data KRENOVA Kota Magelang yang Berprestasi

Tahun	Temuan	Penemu
2005	Tepung Jamur Tempe	Musinem Paulus
2006	Alat Pengatur Pemberian Pakan Udang/Ikan	Sam Wahyono
2007	Pemanfaatan & Pengolahan Sampah Organik Briket Arang & Asap Cair	Sarwo Imam Santosa dkk
2008	Pembangkit Listrik Tenaga Angin Convertible	Ir. Wijaya Widjanarko, MT

2009	Penggunaan Kartu Karakter Pustaka Meningkatkan Fungsi Perpustakaan	Mursidi, S.Pd
2010	Alat Pengering Kerupuk dengan Memanfaatkan Gas Buang Industri Kerupuk	Oesman Raliby dkk
2012	Pemanfaatan Limbah IPAL Menjadi Paving Blok Bermutu dengan Teknologi Vibrasi Mesin Pencetak Paving Blok	Awaludin Setya Aji dkk
2012	Jemuran Otomatis dengan Sensor Air Hujan	Budi harjono dkk
2013	Pemanfaatan Pelepah Pisang Abaca sebagai bahan serat tenun dengan fungsionalisasi antibakteri : gagasan awal dalam roadmap pengembangan green and zero waste product	Canggih Setia Budi, S.Si, M.S
2015	Teknik Pewarnaan alam pada Batik Tuguran	Sylvia Eriana Dewi
2016	Metode pembelajaran matematika dengan "Matcha" dan Tabela Cerdas	Lukman Hardi Sam Wahyono

Sumber : Buletin KRENOVA, 2016

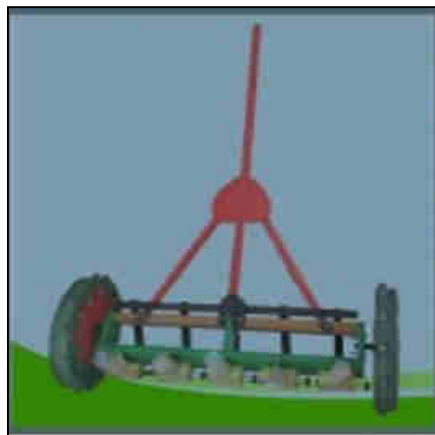
Pada skala nasional, dari kegiatan ini terlahir inovator Kota Magelang yang tercatat sebagai inovator Indonesia versi Business Innovation Centre (BIC), yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahun 2010 tercatat dalam buku 102 inovator Indonesia terbitan Kementerian Ristek. Temuan "Alat Pengering Kerupuk dengan Pemanfaatan Gas Buang" Karya Oesman Raliby, ST., M.Eng dan Dra Retno Rusdjiati, M.Kes.keduanya dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 2) Tahun 2011 salah satu inovator Kota Magelang (**Drs. Fence Ohoilulin**, warga kel. Kramat selatan) karyanya masuk 103 Inovasi terbitan Kementerian Ristek dengan karyanya "Bio-

Qita alternatif pupuk organik lokal yang Murah, Mudah dan Efisien dari Kota Magelang

- 3) Alumni KRENOVA 2010 (Sdr. **Daryono**, warga Tidar Selatan) dengan karyanya **Pompa Air Hidrolik** berhasil menjadi **Juara 3 Pemuda Pelopor Tingkat Nasional**
- 4) Sam Wahyono (KRENOVA 2014) berkesempatan sebagai kandidat untuk masuk ke buku 108 Inovator Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti.

Gambar 3.1.
TABELA Cerdas, Pemenang Favorit
KRENOVA Jawa Tengah Tahun 2016



Tindak lanjut dari berbagai temuan KRENOVA yang berkualitas dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah pengiriman KRENOVA pada level kompetisi yang lebih tinggi. Selain itu skema tindak lanjut KRENOVA yang lain adalah diseminasi, inkubasi, perlindungan Kekayaan Intelektual, hilirisasi dan komersialisasi. Pada Tahun 2016 terjaring sebanyak 19 (Sembilan belas) KRENOVA dari berbagai bidang temuan dan sebanyak 6 (enam) temuan dinilai cukup berkualitas sehingga mendapatkan tindak lanjut berupa pengiriman pada kompetisi KRENOVA Provinsi Jawa Tengah, seleksi 108 Inovasi Indonesia dan diseminasi pada Pameran Produk Inovasi (PPI).

Realisasi indikator kinerja Persentase Krenova Masyarakat yang Berkualitas pada tahun 2016 adalah sebesar 8 % dari target sebesar 5 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 160 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 23 %, maka nampaknya cukup optimis indikator akan dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Masyarakat Kota Magelang sangat berperan dalam pencapaian indikator ini. Adapun anggaran dari program perencanaan sosial budaya dan kegiatan penjangkaran kreativitas dan inovasi masyarakat yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 78.000.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 76.260.623, 00 atau sebesar 97, 77 %.

Permasalahan :

- Masih adanya sebagian masyarakat yang enggan untuk menunjukkan hasil kreativitas dan inovasinya karena terbatasnya kemampuan untuk mendeskripsikan temuannya dalam bentuk tulisan proposal

Solusi :

- Pendampingan penyusunan proposal dan teknik presentasi melalui *Coaching Clinic* KRENOVA serta perlindungan Kekayaan Intelektual

2. Persentase Krenova OPD yang Berkualitas

Esensi dari Krenova OPD adalah lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Magelang. Kriteria kualitasnya suatu inovasi pelayanan publik antara lain didasarkan pada aspek kemanfaatannya yang secara nyata dapat dirasakan oleh pengguna

layanan publik maupun dapat atau tidaknya direplikasi di tempat lain. Indikator ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui gerakan ***One Agency One Innovation***.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual.

Untuk menumbuhkembangkan inovasi pelayanan publik, maka di tingkat pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik secara nasional dan akan diberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang mempunyai inovasi terbaik dari yang terbaik. Selanjutnya inovasi pelayanan terbaik akan dikawal untuk dilakukan replikasi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut diatas dengan mengirimkan 1 (satu) proposal usulan inovasi pelayanan publik melalui SINOVIK KemenPAN dan RB. Inovasi pelayanan publik yang diusulkan adalah Sistem Informasi DATA GO pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagai inovasi pelayanan publik dalam penyediaan data kepada masyarakat luas.

Gambar 3.2.

DATA GO sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Penyediaan Data



Meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal pada kompetisi tersebut, DATA GO setidaknya dapat merepresentasikan inovasi layanan data-data makro maupun data sektoral Kota Magelang secara mudah kepada stakeholders pengguna data. Para pengguna data dapat mengakses laman : datago.magelangkota.go.id kapan dan di manapun, maka data makro dan statistik sektoral yang telah tervalidasi dan terkini akan tersaji secara cepat dan akurat.

Sebenarnya masih ada beberapa inovasi pelayanan publik di OPD lainnya, namun terkadang OPD tidak menyadari bahwa yang telah dilakukan adalah merupakan suatu inovasi. Karena inovasi pelayanan publik tidak terbatas pada penggunaan teknologi informasi saja. Namun prosedur pelayanan, SOP dan bentuk layanan publik lainnya yang memangkas jalur birokrasi juga termasuk dalam inovasi pelayanan publik. Kurangnya pemahaman akan inovasi pelayanan publik di Kota Magelang menyebabkan minimnya inovasi pelayanan publik yang tercatat di Kota Magelang. Pada tahun 2016 DATA GO menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik yang tercatat karena mengikuti kompetisi ditingkat pusat.

Realisasi indikator kinerja **Persentase Krenova OPD yang Berkualitas** pada tahun 2016 adalah sebesar 2 % dari target sebesar

0 % dengan tingkat capaian kinerja indikator lebih dari 100 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 12 %, maka hal ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik OPD yang berkualitas di Kota Magelang.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Masing-masing OPD di Kota Magelang mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan pencapaian indikator ini. Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini belum dianggarkan. Dalam Renstra Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang 2016-2021 akan diadakan kegiatan Penjaringan Inovasi OPD Kota Magelang mulai tahun 2017.

Permasalahan :

- Masih rendahnya inovasi pelayanan publik oleh organisasi perangkat daerah

Solusi :

- Kompetisi Kreativitas dan Inovasi OPD akan dilakukan mulai tahun 2017 untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik

3. Persentase Hasil Riset / Kajian yang Ditindaklanjuti

Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Adapun

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Tindak lanjut dari suatu hasil riset / kajian yang dimaksud tentu saja bukan sekedar mempublikasikan hasil riset/kajian tersebut. Skema tidak lanjut hasil riset / kajian yang dimaksud adalah dengan mengikuti ruang lingkup kelitbangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (3) tentang lingkup kegiatan kelitbangan utama yang meliputi : **penelitian, pengkajian**, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.

Tindak lanjut dari suatu hasil riset / kajian sering kali tidak dapat dilakukan secara langsung pada tahun yang sama. Bahkan tindak lanjut hasil riset / kajian dilakukan setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga pengukuran capaian indikator ini terfokus pada tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2016 (tahun n) atas hasil-hasil riset/kajian yang telah dilakukan pada tahun n dan tahun-tahun sebelumnya. Hasil riset merupakan keluaran kegiatan penelitian tematik, sedangkan kajian merupakan keluaran dari kegiatan analisis kajian permasalahan dan isu-isu strategis.

Realisasi indikator kinerja **Persentase Hasil Riset / Kajian yang Ditindaklanjuti** pada tahun 2016 adalah sebesar 25 % dari target sebesar 25 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 100 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 50 %, maka hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan

menidaklanjuti seluruh hasil riset / kajian yang telah dilakukan agar hasil riset / kajian tidak hanya memenuhi lemari perpustakaan namun menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada. Pada tahun 2016, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Analisis Situasi Pembangunan Manusia, Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah, Kajian Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kota Magelang dan Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Adapun anggaran dari program perencanaan sosial budaya dan kegiatan penjangkaran kreativitas dan inovasi masyarakat yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 333.688.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 297.103.375, 00 atau sebesar 89,04 %.

Permasalahan :

- Belum adanya paradigma perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis riset/kajian

Solusi :

- Tema riset-riset yang dilakukan perlu dipilih secara tepat sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan permasalahan di daerah.
- Melaksanakan FGD Kelitbang untuk mengetahui kebutuhan riset yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan,

4. Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi

baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan adalah suatu bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian/pengkajian, dengan melakukan abstraksi guna menemukan berbagai aspek/variabel tertentu dari satu atau berbagai penelitian/pengkajian. Selanjutnya, berbagai aspek/variabel tertentu tersebut digunakan sebagai masukan dalam menyusun sebuah naskah akademis atau model untuk dimanfaatkan dalam penyusunan regulasi atau model/program percontohan di daerah.

Adapun Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Indikator Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK juga merupakan ruang lingkup kelitbangan utama yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (3) tentang lingkup kegiatan kelitbangan utama yang meliputi : penelitian, pengkajian, **pengembangan**, perekayasaan, **penerapan**, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.

Realisasi indikator kinerja **Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK** pada tahun 2016 adalah sebesar 7 % dari target sebesar 5 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 140 %. Pada tahun 2016 hanya ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat dengan keluaran berupa kompetisi roket air bagi siswa SMP.

Gambar 3.3. Lomba Roket Air sebagai Upaya Menumbuhkan Budaya IPTEK



Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 20 %, maka indikator ini diprediksi akan dapat tercapai, mengingat pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih banyak kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini sangat ditentukan oleh sinergitas antara stakeholder terkait utamanya pemerintah, akademisi dan masyarakat. Adapun kegiatan Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 72.000.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 68.868.375, 00 atau sebesar 95, 65 %.

Permasalahan :

- Kurangnya kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK

Solusi :

- Menyiapkan skema pendanaan kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK pada RENSTRA 2016-2017

5. Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan

Indikator pemantauan dan evaluasi dalam kelitbangan dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang, dan kinerja dari para pelaku kelitbangan lainnya. Hasil dari pemantauan pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan sebagai dasar perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan kelitbangan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (2) tentang lingkup kegiatan kelitbangan utama yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, ***pemantauan, evaluasi*** dan pelaporan.

Adapun Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu : Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian. Sedangkan kegiatan yang terkait dengan evaluasi kebijakan belum dilakukan.

Realisasi indikator kinerja **Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan** pada tahun 2016 adalah sebesar 7 % dari target sebesar 5 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 140 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 20 %, maka indikator ini diprediksi akan dapat tercapai, mengingat pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih banyak kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada. Adapun anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 43.336.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 41.092.300, 00 atau sebesar 85, 01 %.

Permasalahan :

- Belum adanya format baku monitoring kegiatan penelitian yang sedang dilakukan dan evaluasi atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan

Solusi :

- Menyiapkan SOP monitoring dan evaluasi penelitian

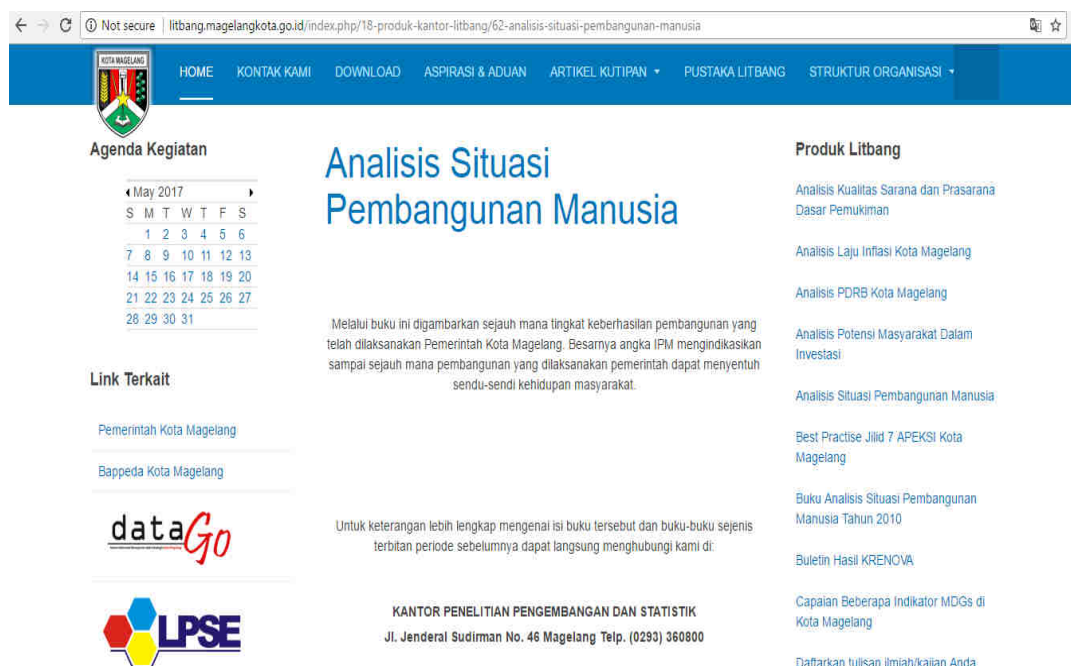
6. Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

Hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, dan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 46 tentang publikasi.

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang pada tahun 2016 memanfaatkan kedua sarana publikasi tersebut yaitu melalui majalah berkala ilmiah melalui buku analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang berisi kumpulan hasil kajian dan publikasi melalui laman internet. Adapun majalah berkala ilmiah atau jurnal yang diterbitkan secara online (*Open Journal System*) baru akan dirintis pada tahun 2017.

Gambar 3.4.
Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Melalui Laman Internet



Realisasi indikator kinerja **Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian** pada tahun 2016 adalah sebesar 30 % dari target sebesar 40 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 133 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini

pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 80 %, maka indikator ini diprediksi akan dapat tercapai, mengingat pada tahun-tahun selanjutnya akan ada kegiatan yang secara khusus mendukung tercapainya indikator ini.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada. Adapun kegiatan yang secara khusus mendukung tercapainya indikator ini pada tahun 2016 belum dianggarkan.

Permasalahan :

- Belum adanya kegiatan khusus untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian

Solusi :

- Menyiapkan kegiatan publikasi hasil-hasil penelitian secara khusus seperti Pengelolaan *e-library* dan *Open Journal System*

7. Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi merupakan bagian dari Kegiatan Penunjang Kelitbangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 8 tentang Kegiatan Penunjang yang meliputi : fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi.

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang pada tahun 2016 belum menganggarkan kegiatan penunjang kelitbangan yang berkaitan dengan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi. Kegiatan tersebut baru akan dirintis pada tahun

2017 sebagaimana tertuang dalam RENSTRA 2016-2021 melalui Kegiatan Fasilitasi Inkubator Bisnis Masyarakat Berbasis Teknologi dan kegiatan lain yang semisal.

Realisasi indikator kinerja **Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi** pada tahun 2016 adalah sebesar 0 % dari target sebesar 0 % dengan tingkat capaian kinerja indikator yang belum bisa diukur. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini belum ditargetkan untuk dilaksanakan, baru kemudian pada tahun-tahun selanjutnya indikator ini mulai ditargetkan. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 15%, maka indikator ini diprediksi akan dapat tercapai, mengingat pada tahun-tahun selanjutnya akan ada kegiatan yang secara khusus mendukung tercapainya indikator ini

Permasalahan :

- Belum adanya kegiatan khusus yang memberikan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi

Solusi :

- Menyiapkan kegiatan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi seperti Fasilitasi Inkubator Bisnis Masyarakat Berbasis Teknologi atau yang semisalnya

8. Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI

Kelitbangan utama yang dihasilkan Badan Litbang Kemendagri dan/atau Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 45 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang pada tahun 2016 telah memfasilitasi produk teknologi dan inovasi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini berupa pendampingan perolehan Kekayaan Intelektual baik Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana, Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun Perlindungan Varietas Tanaman semuanya dibiayai oleh APBD, sehingga masyarakat dapat memperoleh KI secara gratis.

Realisasi indikator kinerja **Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI** pada tahun 2016 adalah sebesar 5 % dari target sebesar 0 % dengan tingkat capaian kinerja indikator lebih dari 100 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 15 %, maka hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada. Adapun anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 74.240.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 56.720.750, 00 atau sebesar 76, 40 %.

Permasalahan :

- Masih sangat rendahnya Kekayaan Intelektual dari Kota Magelang yang terdaftar

Solusi :

- Mensosialisasikan akan pentingnya Kekayaan Intelektual kepada para inventor di Kota Magelang

9. Cakupan Penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah)

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ialah proses kegiatan secara keseluruhan untuk mengembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah, lembaga (litbang, pendidikan, dunia usaha), dan masyarakat. Dengan penguatan inovasi tersebut merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah itu sendiri.

Penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) mempunyai peran penting bagi perencanaan pembangunan baik itu inovasi-inovasi atau perencanaan pembangunan yang lainnya. Ruang lingkup atau cakupan penguatan SIDA meliputi : a. Kebijakan penguatan SIDA, b. Penataan unsur SIDA, dan c. Pengembangan SIDA.

Cakupan Penguatan SIDA di Kota Magelang hingga tahun 2016 telah meliputi ketiga ruang lingkup penguatan SIDA tersebut. Dari sisi kebijakan, penguatan SIDA di Kota Magelang telah terakomodir dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dan telah tersusun Rodmap SIDA. Ditinjau dari sisi penataan unsur SIDA di Kota Magelang telah terbentuk Tim Koordinasi SIDA dan Badan Penelitian dan Pengembangan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah berkaitan dengan inovasi. Adapun bila ditinjau dari segi pengembangan SIDA maka di Kota Magelang telah dikembangkan tema SIDA sesuai dengan *local genius* dan kompetensi inti / potensi unggulan Kota Magelang.

Realisasi indikator kinerja **Cakupan Penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah)** pada tahun 2016 bila diukur secara kualitatif adalah sebesar 35 % dari target sebesar 30 % dengan tingkat capaian kinerja indikator lebih dari 117 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 75 %, maka hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras mengingat perhatian dari para pemangku kepentingan terhadap Penguatan SIDA di Kota Magelang sangat kurang.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada. Adapun anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 45.000.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 35.879.098, 00 atau sebesar 79, 77 %.

Permasalahan :

- Kurangnya perhatian dari para pemangku kepentingan terhadap Penguatan SIDA di Kota Magelang

Solusi :

- Mensosialisasikan akan pentingnya SIDA di Kota Magelang

10. Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan

Indikator ini sangat relevan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kelitbangan pendukung diantaranya sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 diantaranya adalah ***peningkatankapasitas kelembagaan, kapasitas sumberdaya manusia*** dan ***penguatan kerjasama kelitbangan***.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 52 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbang dilakukan dengan cara pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi dilakukan melalui kegiatan antara lain: pendidikan jenjang akademis; pendidikan dan pelatihan; studi komparasi; magang; seminar dan lokakarya. Adapun pada pasal 54 disebutkan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang, dapat **bekerja sama** dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbang lingkup pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2016, capaian indikator ini cukup menjanjikan. Disisi kelembagaan Pemerintah Kota Magelang meraih 2 (dua) penghargaan bergengsi tingkat nasional dibidang teknologi dan inovasi, yaitu :

1. **Anugerah Budhipraja**, sebagai finalis yang diberikan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai apresiasi kepada Pemerintah Kota Magelang yang telah mandiri dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah dan pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik.
2. **Anugerah Widigdapura, sebagai Kabupaten/Kota Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Terbaik yang diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.**

Kedua penghargaan tersebut diserahkan pada Rangkaian Acara Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016 di Surakarta pada Tanggal 10 Agustus 2016.

Gambar 3.5.

Penyerahan Anugerah Budhipraja Tahun 2016



Gambar 3.6.

Penyerahan Anugerah Widigdapura Tahun 2016



Untuk meningkatkan kapasitas lembaga kelitbang, maka Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya berkolaborasi dengan mitra kerja yang telah dibentuk yaitu Jaringan Penelitian dan Pengembangan, Dewan Riset Daerah (DRD) dan Forum Alumni Karyasiswa.

Dari segi kerja sama kelitbang, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Technology Business Innovation Centre (TBIC)

Kemenristek Dikti tentang pemanfaatan seluruh fasilitas laboratorium yang ada di Kawasan Puspiptek Serpong. Kerjasama ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh SKPD / OPD teknis di Kota Magelang.

Dari segi peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan, pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang personil Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik berkesempatan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan *Open Journal System* yang diselenggarakan oleh LIPI di Jakarta dan Yogyakarta.

Realisasi indikator kinerja **Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan** pada tahun 2016 bila diukur adalah sebesar 35 % dari target sebesar 30 % dengan tingkat capaian kinerja indikator lebih dari 117 %. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 75 %, maka indikator ini diprediksi akan dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada. Adapun anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 114.202.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 93.745.063, 00 atau sebesar 82, 09 %.

Permasalahan :

- Kurangnya SDM Peneliti

Solusi :

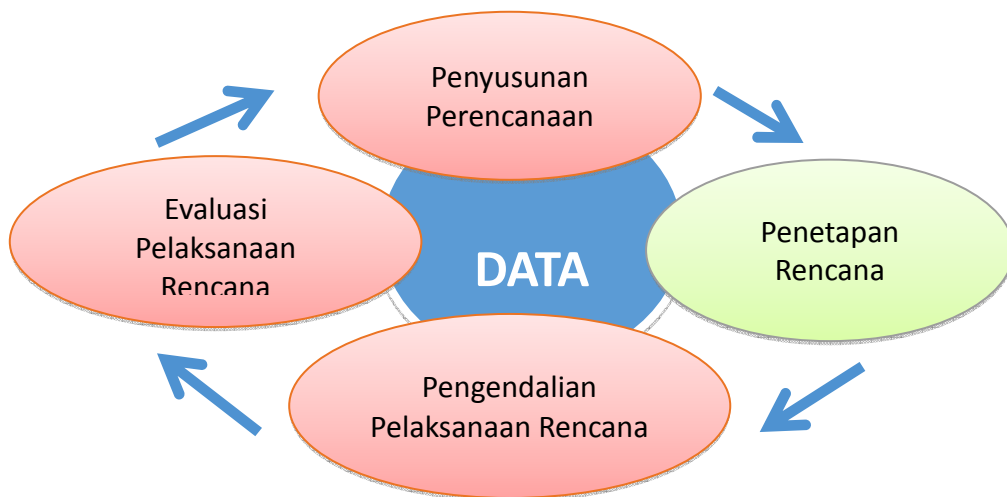
- Mengusulkan untuk pengangkatan SDM Peneliti

11. Persentase Pemenuhan Data Statistik

Data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai

bahan masukkan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini.

Gambar 3.7.
Peran Penting Data dalam Siklus Perencanaan



Berkaitan dengan kebutuhan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa : "Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang". Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang

berkualitas tergantung dari data/informasi akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Data dasar yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu data dasar indikator makro, diantaranya : PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), dsb. Selain itu berupa data dasar Indikator sosial, yaitu : IPM, data kependudukan, data kemiskinan, data ketenagakerjaan, data kesehatan, dsb.

Dari sisi statistik sektoral, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagai *leading sector* dalam urusan statistik pada tahun 2016 melalui Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah telah merilis beberapa produk data diantaranya : Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia dan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi. Selain dalam bentuk buku, data-data sektoral juga terpublish secara *on line* melalui DATA GO yang merupakan Data Centre Kota Magelang dan dapat diakses melalui laman : datago.magelangkota.go.id. Data dan statistik sektoral yang tersaji berasal dari data teknis seluruh sektor yang telah tervalidasi dan terkini. Tercatat tidak kurang dari 85 % dari jumlah dan jenis data yang terpublikasi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Realisasi indikator kinerja Persentase Pemenuhan Data Statistik pada tahun 2016 adalah sebesar 85 % dari target sebesar 85 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 100%. Hal ini tentu saja menjadi awal yang sangat baik bagi pencapaian indikator ini

sampai dengan akhir periode RPJMD, mengingat tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD namun indikator ini langsung menunjukkan kinerja yang sangat positif. Tantangan beratnya adalah menjaga tren positif pencapaian indikator ini setiap tahunnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Seluruh SDM yang terlibat dalam penyediaan data mampu bekerja secara efektif dalam menyediakan dan mempublikasikan data yang akurat dan terkini agar dapat diakses secara luas. Adapun anggaran dari program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 331.243.000,00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 308.332.050, 00 atau sebesar 93, 08 %.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat Daerah sumber data, sehingga data kurang terpelihara dengan baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah
- b. Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota
- c. Belum kuatnya payung hukum pengelolaan data
- d. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota

Solusi :

- a. Pembinaan secara komprehensif bagi pengelola data pada setiap Perangkat Dearah
- b. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen DATA GO yang mengintegrasikan seluruh data sektoral
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kota Magelang
- d. Sosialisasi tentang pentingnya data kepada stakeholder

D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2016 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang mendapatkan anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp.1.729.416.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program dan 48 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1.579.405.461,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91.33%. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016 dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN	
					fisik	Keuangan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.208.000	303.215.711	12.992.289	100%	95.89%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	576.360	423.640	100%	57.64%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.700.000	19.592.972	5.107.028	100%	79.32%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / oprsnl	3.600.000	2.587.425	1.012.575	85,71%	71.87%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.700.000	62.680.300	3.019.700	100%	95.40%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.750.000	37.795.450	954.550	100%	97.54%
6	Penyediaan alat tulis kantor	11.000.000	10.991.500	8.500	100%	99.92%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	19.311.825	688.175	100%	96.56%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	5.500.000	5.296.400	203.600	100%	96.30%
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.874.000	4.777.250	96.750	100%	97.92%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an	5.000.000	4.759.100	240.900	100%	95.18%
11	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000	1.098.000	502.000	100%	68.63%
12	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	11.687.825	312.175	100%	97.40%
13	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90.300.000	89.877.304	422.696	100%	99.53%
14	Penyediaan jasa tenaga kontrak / honorer daerah/tidak tetap	32.184.000	32.184.000	0	100%	100%

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN	
					fisik	Keuangan
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	209.472.000	198.632.901	10.839.099	100%	94.83%
15	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	36.000.000	34.050.000	1.950.000	100%	94.58%
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.500.000	22.931.000	569.000	100%	97.58%
17	Pengadaan Peralatan gedung kantor	35.156.000	34.545.000	611.000	100%	98.26%
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.546.000	36.536.500	9.500	100%	99.97%
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dns/operasional	34.720.000	29.583.401	5.136.599	100%	85.21%
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29.500.000	28.467.000	1.033.000	100%	96.50%
21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.850.000	3.322.000	1.528.000	100%	68.49%
22	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9.200.000	9.198.000	2.000	100%	99.98%
III	Program Peningkatan Pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	28.395.000	24.793.750	3.601.250	100%	87.31%
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.820.000	5.799.500	20.500	100%	99.65%
24	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	16.725.000	14.444.425	2.280.575	100%	86.36%
25	Penyusunan LKJIP SKPD	5.850.000	4.549.825	1.300.175	100%	77.77%
IV	Program pengembangan data informasi	283.149.000	269.517.550	13.631.450	100%	95.19%
26	Analisis Situasi Pembangunan Manusia	62.181.000	61.480.075	700.925	100%	98.87%
27	Analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah	49.800.000	48.143.000	1.657.000	100%	96.67%
28	Fasilitasi pelaksanaan RUD	79.000.000	78.095.600	904.400	100%	98.86%
29	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	27.586.000	23.014.300	4.571.700	100%	83.43%
30	Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian	20.750.000	18.078.000	2.672.000	100%	87.12%
31	Kajian Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kota Magelang	43.832.000	40.706.575	3.123.425	100%	92.87%
V	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pengembangan daerah	305.442.000	255.231.286	50.210.714	100%	83.56%
32	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek	56.000.000	50.366.863	5.633.137	100%	89.94%

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN	
					fisik	Keuangan
33	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	45.000.000	35.897.098	9.102.902	100%	79.77%
34	Fasilitasi Forum Komunikasi Alumni Karyasiswa Kota Magelang	15.000.000	14.633.250	366.750	100%	97.56%
35	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	43.202.000	28.744.950	14.457.050	100%	66.54%
36	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	72.000.000	68.868.375	3.131.625	100%	95.65%
37	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	74.240.000	56.720.750	17.519.250	100%	75.91%
VI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	16.660.000	14.042.775	2.617.225	100%	84.29%
38	Penyusunan Renstra-SKPD	9.160.000	8.488.925	671.075	100%	92.67%
39	Penyusunan Renja SKPD	7.500.000	5.553.850	1.946.150	100%	77.77%
VII	Program Pengembangan Komuni kasi, Informasi dan Media massa	23.000.000	22.437.690	562.310	100%	97.56%
40	Pengelolaan website	23.000.000	22.437.690	562.310	100%	97.56%
VIII	Program Penyelamatan dan Pelstarian dokumen/arsip daerah	18.800.000	18.133.000	66 7.000	100%	95.92%
41	Pendataan dan Penataan dokumen arsip/daerah	18.800.000	18.133.000	667.000	100%	95.92%
IX	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	98.875.000	68.678.125	30.196.875	100%	69.46%
42	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah	98.875.000	68.678.125	30.196.875	100%	69.46%
X	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	78.000.000	76.260.623	1.739.377	100%	97.77%
43	Penyelenggaraan dan penjarangan KRENOVA	78.000.000	76.260.623	1.739.377	100%	97.77%
XI	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	20.172.000	20.130.000	42.000	100%	99.79%
44	Pemeliharaan RTH	20.172.000	20.130.000	42.000	100%	99.79%
XII	Program pengembangan data informasi/statistik daerah	331.243.000	308.332.050	22.910.950	100%	93.08%
45	Penyusumam dan Pengumpulan data PDRB	81.340.000	76.721.625	4.618.375	100%	94.32%
46	Penyusunan buku Daerah Dalam Angka	84.730.000	78.801.650	5.928.350	100%	93.00%
47	Analisis Laju Perkembangan Inflasi	42.173.000	33.863.725	8.309.275	100%	80.30%
48	Manajemen Data Daerah	123.000.000	118.945.050	4.054.950	100%	96.70%
	JUMLAH	1.729.416.000	1.579.405.461	150.010.539	100%	91.33%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan SKPD.

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa pencapaian organisasi indicator kinerja sasaran secara umum dapat memenuhi target, beberapa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan akan menjadi media umpan baik bagi peningkatan kinerja, program maupun kegiatan di tahun berikutnya.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang pada Tahun 2016, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, mengingat peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan sangat strategis dalam memberikan masukan maupun rekomendasi kebijakan maupun program kepada unit-unit terkait di lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;

2. Strategi peningkatan kinerja yang akan ditempuh antara lain :

- Perlunya upaya peningkatan koordinasi, konsolidasi dan internal dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP dan instrument pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan sampai dengan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- Peningkatan kualitas Produk Kelitbangan agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indicator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang;
- Perlu dilakukan peningkatan dan penajaman indicator kinerja agar perhitungan dan evaluasi kinerja dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Hal tersebut perlu pula diikuti dengan perbaikan terhadap pelaksanaan mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang sinergis dengan system akuntabilitas kinerja;
- Perlu menentukan tagret yang realistis yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan penyediaan anggaran pembiayaan yang sesuai dengan beban target yang ditentukan;
- Dibutuhkan penataan dan konsistensi antara program dan kegiatan, serta antara kegiatan pokok renstra dengan uraian kegiatan tahunan baik yang diuraikan dalam DPA maupun dalam indicator kinerja utama (IKU), Perjanjian kinerja (PK) agar setiap kegiatan dapat berkontribusi secara hirarkhi dan terstruktur terhadap sasaran yang ditargetkan.
- Perlu pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas

untuk mencapai optimalisasi kinerja Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang yang disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public maka pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sudah tidak ada. Berdasarkan Perda tersebut dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Sedangkan untuk urusan statistik menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Magelang.
- Ke depan LKjIP disusun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang.